

KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK EKOWISATA DI KALIMANTAN TENGAH **Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya**

Bhayu Rhama

Abstrak

Ecotourism is an activity that relies on the daily lives of people and their natural combinations in sustainable conditions. Ecotourism is also an economic foundation of the region that is not own by all regions. The government, surrounding community and the tourists who visit the place is also responsible for maintaining the location's sustainability and harmony. Central Kalimantan province that has a lot of potential to develop eco-tourism should start immediately so the region's natures and daily lives is not damaged by mismanagement. Local governments are obliged to issue a Public Policy for ecotourism to improve societies' welfare that can be started to choose Kahajan River in Palangkaraya as an icon of ecotourism in Central Kalimantan.

Kata – kata Kunci:

Ecotourism Public Policy; Kahayan River; Palangka Raya

Pengantar

Indonesia adalah Negara Kepulauan (Deklarasi Djuanda, 1957 dan UNCLOS, 1982) yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Hal ini membuat ekowisata di Indonesia sangat potensial dikarenakan pulau-pulau yang ada memiliki keunikan tersendiri.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia di Pulau Kalimantan yang memiliki potensi besar untuk ekowisata juga. Ia memiliki beberapa sebutan seperti The Heart of Borneo (Deklarasi HoB, 2007), The Jewel of Central Kalimantan (WWF, 2011), REDD+ Province Pilot Project (REDD+, Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2011), bahkan menjadi Paru-Paru Dunia dengan kekayaan hutan alami yang memproduksi oksigen bagi dunia dan menjadi perhatian global. Hal ini membuat Kalimantan Tengah secara alami memiliki modal dasar yang cukup besar untuk mengembangkan ekowisata.

Kalimantan Tengah terletak di 111° BT hingga 116° BT dan 0° 45' LU serta 3° 30' LS. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 5 / 2003 Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2002 mempunyai 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kalimantan Tengah juga memiliki wilayah lautan yang luas dengan garis pantai sepanjang 750 km di pesisir Laut Jawa (Biro Pusat Statistik Kalimantan, 2007). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah dengan hasil tambang yang serupa (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2005).

Tetapi sangat disayangkan bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah seperti batu bara, biji besi, emas, nikel, kayu, karet, rotan dan perkebunan besar swasta membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara tanpa sadar masih menggantungkan diri pada penjualan komoditi mentah untuk memacu pertumbuhan ekonominya, dimana hal ini dapat membahayakan keberlanjutan generasi yang akan datang karena rusaknya ekologi dan ekosistem alam di Kalimantan Tengah. Dengan adanya kekayaan alam yang dapat dijual secara langsung (bahan mentah) dengan mudah, tanpa harus memerlukan kemasan yang

menarik, menyebabkan perhatian pemerintah untuk mendorong pemasukan dan kegiatan ekonomi yang lebih aman seperti dari sektor pariwisata khususnya ekowisata sedikit terpinggirkan.

Ekowisata mempunyai andil yang cukup besar dalam menjaga ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan di sebuah daerah. Tentunya dengan melakukan ekowisata yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan (Xavier Font dan Janet Cochrane, 2005). Akan tetapi kebijakan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah jarang menyentuh langsung permasalahan ekowisata kalau boleh dikatakan tidak ada. Sebagai contoh adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan orang utan dan Taman Nasional Sebangau yang terkenal dengan daerah konservasi hidrologi dalam pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh yang lain adalah kondisi Sungai Kahayan yang berada di tengah kota dan menjadi ikon Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Sungai besar yang tercemar karena limbah merkuri dari penambang emas di hulu sungai (Bappedalda Kalteng, 2005) dan tercemar karena aktifitas masyarakat disekitarnya untuk kehidupan sehari-hari juga belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal di lingkungan global, kondisi alam berupa sungai tersebut merupakan sebuah aset yang tidak ternilai harganya karena tidak dimiliki oleh semua daerah.

Tentunya untuk menata pembangunan ekowisata di Kalimantan Tengah tidak dapat dilakukan dengan membabi buta dikarenakan potensi SDA yang sangat luas dan kebutuhan biaya yang cukup besar dengan anggaran terbatas. Maka perlu dipilihlah sebuah ikon ataupun ciri khas yang dapat menunjukkan identitas Kalimantan Tengah dengan Ecotourismnya. Dengan banyaknya sungai yang membelah Provinsi Kalimantan Tengah seperti Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya dan Sungai Seruyan maka dapat dipilih Sungai Kahayan yang membelah kota Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah dapat mewakili potensi ekowisata sungai yang ada untuk ditunjukkan kepada masyarakat regional maupun internasional.

Perencanaan Penataan Kawasan Flamboyan Bawah

Sungai Thames di London, Sungai Rheines di Jerman, Sungai Mutiara (Pearl River) di Guangzhou merupakan daya tarik wisata sungai (River Cruise) yang menjadi unggulan di negaranya masing-masing. Biaya yang harus dikeluarkan wisatawan juga lebih besar dibandingkan dengan obyek wisata darat lain. Tetapi obyek wisata sungai tetap ramai dipadati oleh pengunjung. Sungai-sungai itu bersih, menarik dan dikelola dengan baik. Banyaknya wisatawan yang memadati River Cruise dapat kita pahami juga karena tidak banyak kota yang dibelah oleh sungai besar dimana aktivitas harian yang unik tercipta disana.

Pemerintah Kalimantan Tengah dalam hal ini pemerintah kotamadya yang mempunyai aset alam tersebut tentunya juga tidak akan tinggal diam. Salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk menjadikan kawasan Wisata Bantaran Sungai Kahayan Palangka Raya yakni dengan membangun sarana dan prasarannya pendukungnya termasuk memindahkan permukiman warga yang saat ini banyak berdiri di jalur hijau bantaran sungai diperkirakan memerlukan dana hingga mencapai setengah triliun. Sebuah dana yang cukup banyak untuk dapat merealisasikan rencana tersebut. Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pertamanan Pemko Palangka Raya, Adirama Bahan, Kamis (2/2/2012) mengatakan, dalam merealisasikan pembangunan kawasan wisata bantaran sungai tersebut, Pemko Palangkaraya menerapkannya secara bertahap dan memerlukan bantuan pendanaan dari pihak ketiga.

Dasar alasan pemindahan penduduk di Bantaran Sungai Kahayan sangat kuat dikarenakan Kawasan Bantaran Sungai Kahayan akan dijadikan sebuah kawasan wisata ekologi yang

merupakan salah satu kawasan hijau yang sudah tertuang dalam tata ruang wilayah kota. Apabila ada permukiman maka permukiman tersebut ilegal karena penduduk yang mendirikan rumahnya di sana tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dikarenakan status kepemilikan tanah di daerah ini tidak ada. (RP4D Palangka Raya, 2003)

Akan tetapi sehubungan dengan aspirasi masyarakat, pertimbangan sosial politis dan mengingat kawasan permukiman Kawasan Bantaran Sungai Kahayan merupakan daerah hunian dalam kurun waktu lama maka di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2001 disebutkan bahwa Kawasan Danau Seha sebagai Kawasan Permukiman Terbatas. Dikatakan sebagai Kawasan Permukiman Terbatas karena masyarakat bermukim di sana dibatasi dalam penggunaan luasan lahan dan peruntukannya terhadap Garis Sempadan Sungai dan Jalur hijau. Dari Uraian diatas terdapat dua kepentingan yaitu, kepentingan penduduk sekitar yang sudah merasa terikat dengan lokasi dalam hubungannya dengan kehidupan sosial ekonomi, serta kepentingan pemeliharaan bantaran sungai yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan sumber daya air.

Tentunya program penataan ini akan memperoleh hasil yang sangat maksimal untuk mewujudkan kawasan wisata di Sungai Kahayan. Efek lain dari program tersebut adalah relokasi penduduk yang telah menetap di wilayah tersebut sehingga terkadang terjadi ketidaksepahaman masyarakat dengan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam mengembangkan potensi kawasan wisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.

Menciptakan Komunitas Masyarakat Bantaran Sungai Kahayan yang Berwawasan Wisata

Sungai Kahayan yang membelah kota Palangka Raya memiliki banyak penduduk yang bermukim di pinggir sungai tersebut. Pada jaman dahulu keberadaan sebuah kota di wilayah Kalimantan dan Kalimantan Tengah pada khususnya ditunjang oleh keberadaan sungai. Hal tersebut dikarenakan sungai merupakan transportasi utama dan sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak. Masyarakat di pinggir Sungai Kahayan tepatnya yang berada di Kota Palangka Raya sebenarnya bukanlah penduduk asli melainkan pendatang yang menggantungkan hidupnya pada perdagangan. Artinya lingkungan masyarakat permukiman Flamboyan Bawah ini bersifat heterogen. Adapun pendatang yang mendominasi suku adalah kebanyakan suku Banjar, suku Banjar ini memiliki karakter budaya yang biasa hidup bermukim di tepian sungai. Disamping itu juga pengaruh tingkat pendapatan yang kecil, sehingga mereka tidak mampu membeli tanah di daratan atau membangun rumah di daratan karena sangat mahal. (Tari Budayanti Usop, 2003)

Mereka telah hidup turun temurun dan membentuk komunitas di bantaran Sungai Kahayan. Ada yang hidup di atas lanting (sejenis rumah terapung) ada pula yang telah hidup di bantaran sungai dengan konsep rumah panggung untuk menghindari pasang surutnya air sungai. Lokasi merupakan faktor penentu mengapa suatu kawasan tetap eksis keberadaannya. Ditinjau dari karakteristik kawasan di tepian sungai, bahwa lokasi permukiman di tepian sungai memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi sebab dapat dicapai dari darat dan dari air (Iwan Suprijanto, 2001). Permukiman Flamboyan Bawah ini berada pada lokasi yang letaknya sangat strategis, dekat dengan pusat pelayanan kota (tempat bekerja, pendidikan, pasar, dan akses jalur transportasi umum). Memiliki nilai aksesibilitas yang tinggi tepat lokasi yang dituju, baik lokasi bekerja, perkantoran, sarana pendidikan, rumah sakit, pelabuhan, dan pasar. Masyarakat yang memilih tinggal di permukiman ini adalah karena lokasi bekerja dekat dengan sumber usaha sehingga sangat mudah dan murah untuk menjangkau seluruh akses pelayanan kota.

Dari sudut pandang keunikan dan kepariwisataan, kehidupan di bantaran Sungai Kahayan yang ditempati penduduk cukup menarik. Dengan modal utama Daerah Aliran Sungai Kahayan dan dibangunnya jalan-jalan serta bangunan dari kayu menambah daya tarik untuk menjadikannya sebuah kawasan wisata. Akan tetapi kondisinya cukup memprihatinkan. Kurangnya kebersihan, penataan rumah dan sanitasi menjadi tantangan utama untuk menjadikannya sebuah desa wisata. Di satu sisi, meskipun padat dengan penduduk, keamanan di lingkungan tersebut cukup terjaga. Hal ini sangat positif untuk menjadi sebuah nilai pendukung dalam mengembangkan kawasan wisata dan pihak Pemerintah Daerah paham serta mengerti akan potensi tersebut. Program-program mulai dijalankan untuk membuat kawasan sungai tersebut indah dipandang dan dapat menarik wisatawan.

Pada umumnya apabila sebuah kawasan dijadikan sebuah daya tarik wisata maka akan mendatangkan banyak keuntungan untuk semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga apabila Kawasan Bantaran Sungai Kahayan menjadi kawasan wisata atau desa wisata, maka hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Meskipun keberadaan masyarakat di bantaran Sungai Kahayan tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan dari pemerintah, di sisi yang lain secara manusiawi kita juga tidak dapat memindahkannya begitu saja dari lingkungan yang sudah mereka diami sejak puluhan tahun lalu. Program sosialisasi sadar wisata untuk membuat masyarakat sadar wisata dapat diandalkan untuk keadaan ini. Keterlibatan minimal 1 kelurahan diwajibkan agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan yang diharapkan dari hal ini pada awalnya adalah supaya setiap keluarga menjaga lingkungannya masing-masing, baik dari segi kebersihan dan keramahan terhadap lingkungan.

Langkah konkret pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat di Bantaran Sungai Kahayan yang khususnya tepat berada di pinggir sungai supaya tidak membangun rumah tinggalnya membelakangi sungai. Hal tersebut bertujuan supaya setiap keluarga secara sadar bahwa sungai adalah halaman depan mereka yang berarti menjaga kebersihannya dan tidak membuang kotoran apapun di depan rumah. Pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu program sosialisasi yang dapat dilakukan.

Program selanjutnya apabila memungkinkan adalah dengan membangun jembatan/titian baja termasuk kelengkapannya (lampu, pengaman dll) di bagian paling luar di sepanjang Sungai Kahayan (lihat ilustrasi) untuk pejalan kaki atau sepeda, mulai dari Tugu Proklamasi Soekarno sampai dengan Pelabuhan Rambang. Dimana ada pos-pos istirahat dan pos untuk dapat keluar masuk kawasan wisata seperti Tugu Proklamasi/Jembatan Kahayan, Desa wisata Flamboyan Bawah, Pasar Kahayan, Sandung Kaharingan dan Pelabuhan Rambang. Tentunya akan ada retribusi yang ditarik untuk masuk titian tersebut. Pengelolaan retribusi dikembalikan kepada masyarakat setempat yang dapat digunakan untuk menunjang kebersihan dan keamanan lingkungan dengan pengembalian pajak kepada pemerintah daerah.

Kesimpulan

Pemerintah perlu menyadari bahwa pembangunan ekowisata harus dilakukan secara runtut dan focus. Apapun pilihan penataan kawasan Flamboyan Bawah yang akan diambil pemerintah daerah pasti memiliki nilai positif dan negatif yang tidak dapat dihindari. Penataan dengan opsi relokasi memberikan sesuatu yang indah dan tertata dengan waktu yang cukup cepat tanpa dapat menghindari konflik yang mungkin terjadi. Adapun sosialisasi pemindahan masyarakat flamboyant bawah tidak dapat dilakukan hanya sekali atau dua kali, puluhan kali dan berbulan-

bulan harus dilakukan seperti yang bisa dicontoh dari Walikota Solo Joko Widodo dalam memindahkan pedagang kali lima ke lokasi yang baru (Joko Widodo, 18 Juni 2010)

Penataan dengan opsi Membangun Komunitas Sadar Wisata juga mempunyai dampak yang serupa. Dampak positif yang diberikan yaitu memanusiaikan penduduk yang sudah berada di tempat tersebut turun temurun dan terciptanya kesadaran dari diri sendiri untuk dapat memelihara lingkungan dan kawasan Sungai Kahayan. Akan tetapi dampak negatif yang dapat menyertai adalah proses sosialisasi memakan waktu yang cukup lama sehingga terkadang tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kebijakan pemimpin daerah dan disisi yang lain adalah tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan tata wilayah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Namun demikian apapun pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah, pilihan tersebut harus mensejahterakan masyarakat dan hasilnya benar-benar dapat diunggulkan untuk menjadi ikon ekowisata di Palangka Raya pada khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. dengan membangun semua destinasi yang ada hubungannya dengan alam di wilayah Kalimantan Tengah.

Hal utama yang paling mendasar di dalam mengambil pilihan kebijakan adalah dengan menyadari dan memahami kecenderungan di pasar global bahwa pariwisata akan menjadi sebuah industry besar yang berdampingan dengan majunya teknologi komunikasi dan transportasi (Wawan Ridwan, 2000). Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah daerah Kalimantan Tengah beserta masyarakatnya menyadari pentingnya asset dan posisi yang dimiliki sehingga dapat memberikan kebijakan ekowisata yang merangkul semua pihak untuk mensejahterakan masyarakat.

Referensi

Fandelli, C (2000) *Ecotourism Development*, Gadjah Mada University, Indonesia

Damanik, J and Weber, FH (2006), *Ecotourism Planning: From theory to application*, Andi Offset, Yogyakarta, Indonesia

Font, X and Cochrane, J (2005) *Integrating Sustainability into Business*, United Nations Environment Programs, France.

Parson, W (1995) *An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar, Surrey, UK

Widodo, J. (2010). *Tips Menata PKL di Kota Solo*. Makalah disajikan pada pertemuan di Gedung Badan Pemenangan Presiden PDI Perjuangan di Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta

Usop, T. B. (2003). *Evaluasi Rencana Tata Tenik Ruang Kawasan Khusus Permukiman Flamboyan Bawah Danau Seha Kota Palangka Raya*, Tesis Program Master, Semarang: Universitas Diponegoro